

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh:
HARA NIANTI
NIM. E01110089

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015

Email: harantanti@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Jumlah RTS-PM Raskin tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin di Kelurahan Sungai Pinyuh, adanya Raskin yang juga dibagikan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat Raskin, tidak tepatnya jumlah Raskin yang diterima RTS-PM, yang efektifnya 15Kg/ bulan. namun yang terjadi 5-6kg/ bulan dan belum berfungsinya UPM sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Penyelenggaraan kebijakan ini diharapkan sesuai dengan Inpres No.8 Tahun 2008 tentang pendistribusian beras miskin (Raskin). Penelitian ini dengan menggunakan Teori dari Nugroho (2004: 179-182) tentang keefektifan implementasi yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target dan tepat lingkungan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi didalam penetapan RTS-PM Raskin antara BPS dan pihak Kelurahan maupun Rukun Tetanggasehingga jumlah penerima manfaat Raskin tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Sungai Pinyuh, Meminimalisir terjadinya konflik didalam lingkungan masyarakat sehingga Raskin juga dibagikan kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM Raskin dimana seharusnya RTS-PM Raskin mendapatkan 15kg/bulan menjadi 5-6kg/bulan hal ini disinyalir rendahnya tingkat kepatuhan pelaksana, Kurangnya sosialisasi dan lemahnya unit pengaduan masyarakat mengakibatkan permasalahan sewaktu pendistribusian Raskin tidak ada kata penyelesaiannya. Saran yang dapat penulis berikan ialah perlunya koordinasi didalam penetapan RTS-PM Raskin dengan melibatkan pihak Kelurahan dan Rukun Tetangga setempat dan melakukan pendataan ulang survei kemasing-masing rumah masyarakat, perlunya kepatuhan pelaksana yaitu Rukun Tetangga didalam pendistribusian Raskin yang harus sesuai dengan ketentuan pemerintah, perlunya sosialisai dan difungsikannya unit pengaduan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajibannya sehingga adanya kejelasan penyelesaian permasalahan yang dirasakan masyarakat RTS-PM Raskin.

Kata-kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendistribusian Raskin.

ABSTRACT

The problem in this research is the number of RTS-PM Raskin does not correspond to the number of poor people in the village Sungai Pinyuh, the Raskin people are not distributed to the beneficiaries in accordance with the criteria Raskin, does not exactly amount Raskin received RTS-PM, which effectively 15kg by the month yet which occurs 5-6 kg by the month and yet the functioning of UPM in accordance with the duties and obligations. Implementation of this policy is expected in accordance with inpres 8 of 2008 on the distribution of rice for the poor (Raskin). This research using the theory of Nugroho (2004: 179-182) about the effectiveness of implementation, namely the right policies, the right execution, the right target and the right environment. The method used is qualitative method. The results showed that the lack of coordination in setting the RTS-PM Raskin between BPS and the urban village and neighborhood so that the number of beneficiaries Raskin does not correspond with the number of poor people in Sub Sungai Pinyuh. Minimizing conflict within the community so that Raskin was also distributed to people who are not registered as RTS-PM. RTS-PM Raskin supposed to get 15 kg per month to 5-6kg by the month, it is pointed out the low level of compliance implementation, lack of socialization and the lack of public complaints unit resulting in problems when distributing Raskin no word completion. Suggestions can be authors give is the need for coordination in establishing RTS-PM Raskin by involving villages and local neighborhoods and perform data collection survey to each home community, the need for compliance and implementation, ie in the neighborhood should be appropriate distribution of Raskin with the duties and its obligations so that the perceived clarity of solving problems of society RTS-PM Raskin.

Keywords: Implementation of the policy, the distribution of Raskin.



PENDAHULUAN

Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Dengan adanya kebijakan Raskin diharapkan pengeluaran masyarakat miskin akan berkurang karena beras dapat di beli dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga beras yang ada di pasar. Sehingga pengeluaran yang biasanya untuk membeli beras dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Namun Kebijakan pendistribusian beras miskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada kenyataannya sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Ini dilihat dari hasil observasi sementara di Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah menunjukkan bahwa Jumlah RTS-PM Raskin tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin di Kelurahan Sungai Pinyuh dimana jumlah masyarakat miskin di kelurahan Sungai Pinyuh 910 KK sedangkan jumlah RTS-PM Raskin hanya 353 KK. Adanya Raskin yang juga dibagikan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan Kriteria penerima manfaat Raskin seperti seperti memiliki kendaraan bermotor, memiliki perhiasan

dan mempunyai rumah yang berdingding semen dan berlantai porselen. Tidak tepatnya jumlah Raskin yang diterima RTS-PM, yang efektifnya 15Kg/bulan namun yang terjadi 5-6kg/ bulan. Raskin didistribusikan kepada masyarakat 3 bulan sekali. Belum berfungsinya UPM sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Maka fokus pada penelitian ini tentang Implementasi Hasil Kebijakan Bupati Tentang Pendistribusian Beras Miskin Tahun 2010 Di Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, dengan mengkaji aspek tepat pelaksana, tepat target dan tepat lingkungan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Ingin mengetahui dan menganalisis efektifitas hasil implementasi kebijakan Bupati tentang pendistribusian beras miskin tahun 2010 di Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, dikaji dari aspek tepat pelaksana, tepat target dan tepat lingkungan.

Manfaat teoritis dari penelitian diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada program ilmu administrasi negara studi implementasi kebijakan, serta dapat dijadikan referensi bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti tentang permasalahan yang sama tentang Efektivitas Implementasi kebijakan

Pendistribusian Raskin. Manfaat praktis berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi implementor kegiatan pendistribusian Raskin Di Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah agar dalam pelaksanaan pendistribusian selanjutnya dapat terlaksana sesuai dengan Keputusan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 511.1/D.1 77/DPUKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*). Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijaksanaan yang sebagaimana dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn(dalam Agustino 2012:139).

Suatu kebijakan yang diimplementasikan haruslah berdampak atau mempunyai efek yang baik terhadap masyarakat. Suatu kebijakan yang diimplementasi haruslah menampilkan keefektivan dari kebijakan itu sendiri. Menurut Nugroho (2004:179-182) bahwa pada prinsipnya ada empat tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektivan implementasi kebijakan.

1. Tepat kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Selain itu apakah kebijakan telah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

2. Tepat pelaksana

Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah tetapi ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana yaitu pemerintah,kerjasamaantara pemerintah-masyarakat atau swasta.

3. Tepat target

Ketepatan target berkenaan dengan apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan dan tidak

adanya tumpang tindih dengan intervensi lain. Yang kedua apakah target dalam kondisi siap untuk disintervensi atau tidak dan apakah target dalam kondisi mendukung atau menolak. dan yang ketiga apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Tepat lingkungan

Lingkungan kebijakan yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. dan lingkungan yang kedua yaitu terdiri dari public opinion (persepsi publik) akan kebijakan dan implementasi kebijakan, selain itu berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti kelompok penekan, kelompok kepentingan dan individuals yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Merujuk pada pendapat Ripley (dalam Purwanto Dan Sulistyastuti 2012:69-70) bahwa untuk memahami keberhasilan implementasi dapat dilihat dari (1) Kepatuhan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau program) dan yang (2)

Merealisasikan atau terwujudnya tujuan-tujuan kebijakan yang wujud nyatanya berupa munculnya dampak kebijakan.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2012:142-144) mengemukakan bahwa ada 6 (enam) faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu:

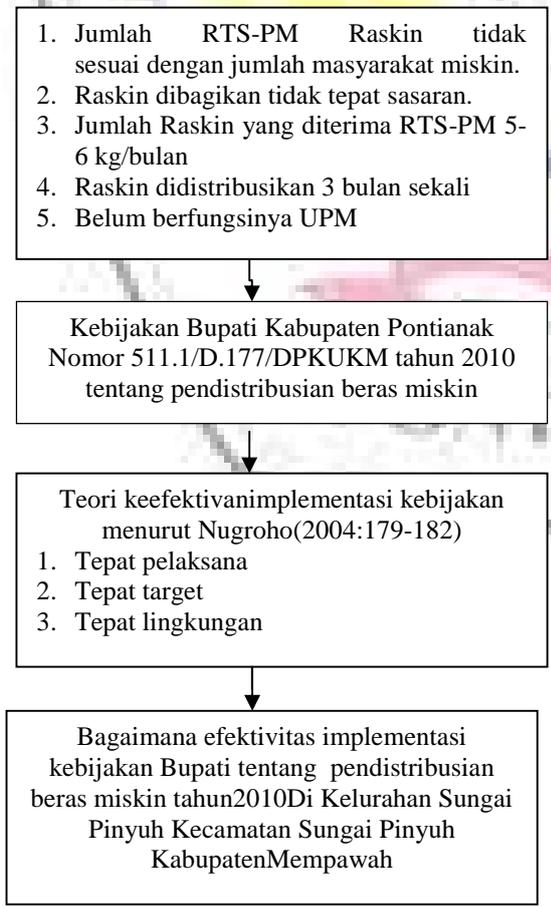
1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana
5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Pendapat lain dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2008:33-34), bahwa suatu implementasi kebijakan Publik harus menggambarkan *content of policy dan contex of policy*. Hal-hal yang terdiri dari *content of policy* (isi dari kebijakan) harus menggambarkan:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh program
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. perubahan yang diinginkan
4. Status pembuat keputusan
5. Siapa pelaksana program
6. Sumber daya yang digunakan

Pada dasarnya kebijakan tersebut akan diselenggarakan dilapangan oleh aktor

secara maksimal dan benar sehingga akan memberi hasil untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran tertentu. Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka peneliti menggunakan teori Nugroho dalam menyelesaikan masalah pendistribusian beras miskin (Raskin) Tahun 2010 di Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Dikarenakan peneliti sendiri ingin Ingin mengetahui dan menganalisis efektifitas hasil implementasi dari kebijakan tersebut. Berikut adalah kerangka pikir penelitian dalam penelitian ini :



METODE PENELITIAN

Dalam penelitisn ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis memilih jenis penelitan ini karenapenulis ingin menggambarkan suatu gejala sosial didalam pendistribusian Raskin berdasarkan data dan fakta. Tempat penelitian dilaksanakan di Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Penelitian dilakukan penulis dari bulan Agustus 2014 sampai dengan November 2014. Sedangkan waktu untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Desember2014 sampai dengan bulan Maret 2015. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yang diambil secara *purposive* adalah sebagai berikut: Lurah Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sebagai penanggung jawab, Tim Raskin Kecamatan Sungai Pinyuh (1 orang), Tim Raskin Kelurahan Sungai Pinyuh (1 orang), Ketua RT 05 RW 05, RT 10 RW 06 dan RT 11 RW 06 Kelurahan Sungai Pinyuh (3 orang), RTS-PM (rumah tangga sasaran penerima manfaat) Kelurahan Sungai Pinyuh (6 orang) yaitu RT 05 RW 05 (2orang), dan RT 10 RW 06 (2orang), dan RT 11 RW 06 (2orang).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik analisa kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang dilakukan setelah data –data terkumpul. Untuk selanjutnya data tersebut diolah dan pengolahan data banyak menggunakan ungkapan kalimat sebagai interpretasi dari data-data yang diolah tersebut. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi, display dan verifikasi. Adapun untuk menguji validitas data penulis menggunakan teori uji validitas dalam Sugiyono (2011:330) yaitu Triangulasi teknik pengumpulan data, Dimana pengujian dilakukan dengan cara mengecek data yang didapat kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari observasi, kemudian dicek lagi dengan wawancara dan studi dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tepat Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dengan sejauh mana para implementor dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai

dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan. Keterlibatan para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan Raskin diperlukan hubungan kerjasama yang terkoordinasi antara para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dan menjadi hal yang penting dilaksanakan secara benar agar tujuan dari kebijakan Raskin dalam memenuhi kebutuhan pokok (beras) untuk masyarakat miskin dapat terlaksana, yaitu dalam penetapan RTS-PM Raskin. Berdasarkan hasil wawancara membuktikan, Tidak dilibatkannya Kelurahan dan Rukun Tetangga dalam penetapan RTS-PM Raskin. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara pelaksana. Koordinasi dilakukan agar adanya kerjasama antara badan atau pihak-pihak yang terkait dengan cara saling membantu dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan dari kebijakan Raskin. Sehingga dapat dimaknai sebagai pihak yang mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat diwilayahnya, keterlibatan pihak Kelurahan dan Rukun Tetangga dalam penetapan RTS-PM menjadi informan kunci bagi anggota BPS dalam menetaapkan RTS-PM Raskin Tidak adanya koordinasi antara pihak BPS dan

Kelurahan Serta Rukun Tetangga dalam penetapan RTS-PM Raskin yang baru mengakibatkan tidak akuratnya data jumlah kepala keluarga (KK) miskin yang didata oleh BPS. Sehingga beras yang dikirim oleh Bulog berdasarkan data yang ditetapkan BPS tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan jumlah masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Sungai Pinyuh. Koordinasi yang baik antara BPS dengan pihak Kelurahan dan Rukun Tetangga setempat akan berdampak hal yang baik pula terhadap pencapaian yang diinginkan oleh pemerintah dalam kebijakan pendistribusian Raskin tersebut. Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan pentingnya koordinasi anantara pelaksana didalam implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan penadapat Van Metter dan Van Horn dalam (Agustino, 2012: 144) koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implemntasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu sebaliknya.

2. Tepat target

Harapan pemerintah terhadap kebijakan Raskin yaitu untuk menekan peningkatan jumlah penduduk miskin

yang ada di indonesia. Kebijakan tersebut akan berhasil jika adanya pengurangan terhadap jumlah masyarakat miskin yang ada. Karena tingkatkemiskinan akan semakin tinggi jika ketepatan sasaran dalam implementasi kebijakan tersebut rendah. Berdasarkan hasil wawancara adanya tekanan berupa ancaman yang diberikan oleh masyarakat terhadap Rukun Tetangga jika tuntutan untuk mendapatkan Raskin tidak terealisasi. Dimana hal tersebut dirasakan sangat membebanipihak Rukun Tetangga sendiri karena mereka tinggal dalam suatu wilayah yang sama dan juga merekaberinteraksi secaralangsung. Sehingga untuk menghindari kondisi yang tidak harmonis antara masyarakat dengan Rukun Tetangga dan antara warga, sehingga Raskin juga dibagikan kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM Raskin dan tidak sesuai dengan kriteria masyarakat penerima Raskin. Sehingga Kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS belum menjadi acuan para pelaksana dalam mendistribusikan Raskin. Walaupun pada dasarnya kebijakan tersebut dinilai telah melanggar mekanisme dalam pendistribusian kebijakan Raskin karena terjadi pengurangan hak-hak masyarakat miskin. Pada dasarnya tingkat kepatuhan implementor dalam melaksanakan kebijakan sangat menentukan

keberhasilan implementasi kebijakan. Pada dasarnya tingkat kepatuhan implementor dalam melaksanakan kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dapat dilihat rendahnya tingkat kepatuhan pelaksana didalam pendistribuisan kebijakan Raskin dimana adanya masyarakat yang tergolong mampu mendapatkan Raskin walaupun jumlah yang didapat tidak sama seperti masyarakat miskin. Hal ini sejalan dengan pendapat Ripley (dalam Purwanto dan Sulistyastuti 2012:69) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipahami pada kepatuhan para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program).

3. Tepat lingkungan

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah wujud dari kepeduliannya terhadap masalah yang dihadapi oleh publik. Sehingga rakyat disini diharapkan dapat seiring sejalan dengan pemerintah yang dimana diharapkan mampu menjadi partner sehingga dapat menilai kinerja dari

implementasi suatu kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Berbagai jenis kebijakan yang dibuat untuk mengatasi masalah publik masyarakat menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap hal tersebut. Kebijakan yang dibuat sedemikian rupa bagusnya oleh para pembuat kebijakan, belum dapat dipastikan apakah kebijakan tersebut dapat mengatasi masalah yang dirasakan oleh masyarakat dan akan tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Jika didalam pengimplementasiannya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara didapat bahwa lemahnya unit pengaduan masyarakat yang seharusnya diposisikan sebagai badan yang memonitoring atau mengevaluasi pelaksanaan pendistribuisan mengakibatkan penanganan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat sewaktu pendistribuisan kebijakan Raskin tidak ada kejelasan penyelesaiannya. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap UPM (unit pengaduan masyarakat) hal ini dikarenakan kurangnya sosialisai dari pemerintah atau pejabat yang berwenang terhadap hal tersebut. Sosialisasi mengenai Unit pengaduan masyarakat kepada

masyarakat atau RTS-PM Raskin sangat diperlukan hal ini dikarenakan merekalah yang memahami kondisi atau segala bentuk masalah didalam pendistribusian Raskin. Pada dasarnya sangat penting membentuk unit pengaduan masyarakat (UPM) yang merupakan badan yang bertanggungjawab menangani atau mengelola pengaduan terhadap masyarakat sewaktu pelaksanaan atau penyimpangan pendistribusian Raskin. *Monitoring* atau pemantauan dalam implementasi kebijakan Raskin sangat diperlukan karena dapat membandingkan apakah pengimplementasian Raskin sesuai dengan rencana atau harapan yang diinginkan oleh pemerintah atau tidak.

PENUTUP

1. Simpulan

- 1) Tepat pelaksana kebijakan pendistribusian Raskin, masih Kurangnya koordinasi antara pelaksana di dalam penetapan jumlah RTS-PM Raskin antara pihak BPS dengan Kelurahan dan Rukun tetangga. Sehingga jumlah beras yang diterima Kelurahan tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin di Kelurahan Sungai Pinyuh.
- 2) Tepat Target kebijakan pendistribusian Raskin,

pendistribusian Raskin belum tepat sasaran dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan pelaksana. Masih ditemukannya Raskin diberikan kepada masyarakat yang dapat dikatakan mampu, hal ini terjadi untuk meminimalisir konflik yang ada dilingkungan masyarakat sehingga Raskin yang seharusnya diterima RTS-PM 15kg/bulan menjadi 5-6kg/bulan.

- 3) Tepat Lingkungan Kebijakan Pendistribusian Raskin, Raskin memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat miskin. Tetapi didalam pengimplementasiannya belum berjalan sesuai harapan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari unit pengaduan masyarakat kepada masyarakat maupun Rukun Tetangga dan Kelurahan. Sehingga mengakibatkan penanganan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat sewaktu pendistribusian kebijakan Raskin tidak ada kejelasan penyelesaiannya.

2. Saran

- 1) Perlunya pendataan ulang dengan melakukan survei kemasing-masing rumah dalam penetapan RTS-PM Raskin dan adanya koordinasi dari Badan Pusat Statistik dengan melibatkan pihak Kelurahan atau RT

setempat agar jumlah RTS-PM Raskin sesuai dengan jumlah masyarakat miskin di Kelurahan Sungai Pinyuh.

- 2) Perlunya kepatuhan pelaksana dalam mendistribusikan Raskin yang berpedoman pada kriteria masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, agar Raskin didistribusikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan atau miskin.
- 3) Perlu difungsikannya Unit Pengaduan Masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajibannya dalam memonitoring proses pendistribusian Raskin dan perlunya sosialisasi oleh pelaksana UPM terhadap mekanisme penyampaian masalah didalam pendistribusian Raskin kepada masyarakat, Rukun Tetangga atau pihak Kelurahan.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Jones, Charles O. 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moekijat.1994. *Koordinasi*. Bandung: Mandar Maju
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- , 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- , 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- , 2010. *Teori administrasi publik*. . Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Robbins, Stephen. 2000. *Perilaku Organisasi (Konsep, Kontroversi dan aplikasi)*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Tangkilisan, Nogi Hesel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia widiasarana Indonesia

Thoha, Miftha. 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Wahab, Solichin Abdul. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Malang: Rineka Cipta

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Sumber lain:

Departemen Pendidikan RI. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Inpres No.8 Tahun 2008. *Tentang Kebijakan Perberasan*

Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor 511.1/D.177/DPKUKM tentang pendistribusian beras miskin di Kabupaten Pontianak tahun 2010

Keputusan Bulog Nomor B499//II//DO402/10/2007 *Tentang Penyesuaian Pagu Raskin*

Pedoman Umum Raskin tahun 2014





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnafis.untan.ac.id>**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : HARA NIANTI
NIM / Periode lulus : E01110089 / IV
Tanggal Lulus : SENIN 13 APRIL 2015
Fakultas/ Jurusan : FISIPOL / ILMU ADMINISTRASI
E-mail address/ HP : haranianti@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa PUBLIKA *) pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

IMPLEMENTASI KEBUAKAN BUPATI TENTANG PENDISTRIBUSIAN
BERAS MISKIN TAHUN 2010 DI KABUPATEN MEMPAYAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

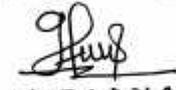
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal PUBLIKA


DR. ARIFIN / M. AB
NIP. 197105021997021002

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal : 5 JUNI 2015


HARA NIANTI
NIM. E01110089

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodew/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)